

## Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Cindi Anjuani Gultom<sup>1</sup> Evi Syuriani Harahap<sup>2</sup> Octavianty Sihombing<sup>3</sup> Sovia Elphani Simarmata<sup>4</sup>

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [cindigultomm@gmail.com](mailto:cindigultomm@gmail.com)<sup>1</sup> [eviharahap21@unimed.ac.id](mailto:eviharahap21@unimed.ac.id)<sup>2</sup>  
[octaviantysihombing10@gmail.com](mailto:octaviantysihombing10@gmail.com)<sup>3</sup> [soviasimarmata@gmail.com](mailto:soviasimarmata@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tiga instrumen utama kebijakan moneter suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Studi ini menggunakan metode literatur dengan mengkaji berbagai sumber akademik, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah terkait implementasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka berperan penting dalam mengatur likuiditas pasar uang, sedangkan kebijakan cadangan minimum digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh perbankan, sehingga berpengaruh langsung terhadap likuiditas dan stabilitas harga. Namun, efektivitas ketiga instrumen ini tidak terlepas dari tantangan eksternal seperti gejolak ekonomi global dan volatilitas aliran modal, yang dapat mengurangi daya kendali Bank Indonesia terhadap stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa sinergi antara suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum sangat penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Suku Bunga, Operasi Pasar Terbuka, Cadangan Minimum, Stabilitas, Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, stabilitas ekonomi menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mengingat kompleksitas dinamika ekonomi yang dihadapi, kebijakan moneter memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tiga kebijakan utama yang sering digunakan adalah suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum. Kebijakan suku bunga merupakan alat yang paling langsung dalam mengatur inflasi dan mempengaruhi keputusan investasi serta pengeluaran rumah tangga. Ketika suku bunga diturunkan, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan berbelanja lebih banyak, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga dapat digunakan untuk mengekang inflasi yang tinggi. Seperti pada tahun 2020, BI menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,75% untuk merespons dampak COVID-19. Kebijakan suku bunga berfungsi untuk mengendalikan inflasi dan mempengaruhi keputusan investasi. Menurut penelitian oleh Mankiw (2016), perubahan suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan, pada gilirannya, memengaruhi pengeluaran konsumen dan investasi perusahaan. Ketika suku bunga rendah, biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga mendorong masyarakat untuk berbelanja dan berinvestasi. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat menekan permintaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Operasi pasar terbuka juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengendalian likuiditas di pasar. Dengan membeli atau menjual surat berharga, Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan ini tidak hanya

membantu dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga memastikan bahwa sistem keuangan tetap stabil dan likuiditas cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi. Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan membeli atau menjual surat berharga oleh BI di pasar uang untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Pembelian surat berharga akan meningkatkan likuiditas perbankan, sedangkan penjualannya akan menyerap likuiditas. Mishkin (2001) menjelaskan bahwa OPT merupakan instrumen yang fleksibel dan efektif dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga jangka pendek. Selain itu, Gray et al. (2000) menambahkan bahwa OPT memiliki keuntungan seperti tidak membebani anggaran negara dan dapat diterapkan dengan cepat. Menurut Salvatore (2019), operasi ini tidak hanya berfungsi untuk menstabilkan suku bunga, tetapi juga mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter. Sementara itu, cadangan minimum merupakan persyaratan yang ditetapkan bagi bank untuk menyimpan sebagian dari nasabah simpanan sebagai cadangan likuid. Menurut Kasmir (2021), kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah krisis likuiditas.

Cadangan Wajib Minimum (GWM) adalah persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang harus disimpan oleh bank di BI. Dengan mengatur GWM, BI dapat mempengaruhi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada masyarakat. Peningkatan GWM akan mengurangi likuiditas perbankan, sedangkan penurunannya akan meningkatkan likuiditas. Menurut AtjehUpdate.com, kebijakan GWM efektif dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Kebijakan cadangan minimum memiliki ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyimpan sejumlah dana tertentu sebagai cadangan di Bank Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah risiko likuiditas yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi. Dengan memastikan bahwa bank memiliki cadangan yang cukup, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dapat terjaga. Persentase cadangan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, cadangan minimum ditetapkan sebesar 5% pada tahun 2021 untuk bank umum, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI perlu didukung oleh kebijakan fiskal dari pemerintah untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia dan pemerintah pusat serta daerah telah meningkatkan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam menghadapi pandemi COVID-19, BI melakukan pelonggaran kebijakan moneter, sementara pemerintah meningkatkan belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi. Efektivitas ketiga instrumen tersebut dalam menjaga kestabilan ekonomi tidak selalu sama, tergantung pada kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, baik di dalam negeri maupun secara global. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai sejauh mana ketiga kebijakan tersebut mampu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan inflasi, ketidakpastian global, dan fluktuasi nilai tukar. Melalui analisis efektivitas ketiga kebijakan ini, penting untuk memahami bagaimana masing-masing kebijakan saling berinteraksi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian literatur yang digunakan dalam analisis efektivitas kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka dan cadangan minimum dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia bertujuan untuk menilai dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya terkait

efektivitas kebijakan moneter tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Metode ini mengumpulkan informasi secara sistematis dari berbagai sumber literatur yang relevan dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran yang luas dan komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kebijakan moneter di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami teori dan praktik kebijakan moneter berdasarkan data dan hasil penelitian nyata tanpa harus mengandalkan pengumpulan data primer. Dengan demikian, metode ini efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam literatur yang ada, sekaligus memberikan dasar bagi pengembangan teori dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pencarian dan seleksi literatur dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan sumber kredibel lainnya yang membahas instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Indonesia. Selanjutnya, literatur tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji konsep, mekanisme, dan efektivitas instrumen kebijakan moneter tersebut dalam konteks perekonomian Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bank Indonesia telah secara efektif menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia. Suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, serta cadangan devisa terbukti memiliki peran krusial dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akan tetapi, efektivitas kebijakan moneter dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti situasi ekonomi global, gejolak pasar keuangan internasional, perubahan harga komoditas, dan ketidakpastian ekonomi global. Faktor-faktor ini dapat mengakibatkan fluktuasi tinggi pada nilai tukar dan harga aset keuangan di Indonesia, serta berdampak pada permintaan global dan aliran modal. Kebijakan moneter mempunyai dampak besar terhadap kestabilan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengatur inflasi dan mempertahankan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia (BI) terus-menerus menjaga inflasi dalam target  $2,5 \pm 1\%$  pada tahun 2025 dengan menerapkan kebijakan suku bunga yang cukup stabil di angka 5,75%. Penyesuaian suku bunga ini memiliki peranan krusial dalam mempertahankan daya beli masyarakat dan mengatur tekanan harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang masih menghadapi tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan ketidakpastian pasar internasional.

Kebijakan suku bunga memiliki peran penting dalam kestabilan ekonomi Indonesia, terutama untuk mengatur inflasi dan mempertahankan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia (BI) memanfaatkan suku bunga acuan, seperti BI 7-Day Reverse Repo Rate, sebagai alat utama untuk memengaruhi kegiatan ekonomi. Peningkatan suku bunga bertujuan untuk mengurangi volume uang yang beredar, menekan inflasi, dan menarik perhatian investor pada instrumen keuangan dalam rupiah. Sebaliknya, penurunan suku bunga diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan biaya pinjaman, yang pada gilirannya meningkatkan investasi dan konsumsi. Namun, efektivitas kebijakan suku bunga ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi global dan domestik, termasuk perubahan harga komoditas, ketidakpastian pasar keuangan global, serta harapan pelaku ekonomi. Kebijakan moneter yang peka terhadap situasi ekonomi global dapat mengurangi risiko ketidakpastian, yang pada akhirnya mendukung stabilitas makro ekonomi. Kebijakan suku bunga yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di Indonesia, khususnya setelah diadopsinya kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) pada tahun 2005. Suku bunga kebijakan terbukti berpengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar, meskipun ada jeda waktu (lag) dalam

penyampaian kebijakan. Penelitian menggunakan metode VECM (Vector Error Correction Model) menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga efektif mengatur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar dalam jangka panjang. Kenaikan suku bunga dalam negeri sebesar satu persen dapat menyebabkan nilai tukar meningkat hingga enam persen, yang menunjukkan bahwa rupiah akan terdepresiasi terhadap dolar. Efektivitas suku bunga juga terikat pada sinergi dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing serta produktivitas ekonomi nasional.

Pelaksanaan ITF disertai dengan pemanfaatan BI Rate sebagai alat kebijakan utama untuk mengendalikan tingkat inflasi sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Menjaga BI Rate (Suku Bunga) di 5,75% pada April 2025 bertujuan untuk menyeimbangkan pengendalian inflasi (yang ditargetkan  $2,5 \pm 1\%$ ) dengan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun suku bunga kredit dan deposito stabil di level 4,77% dan 9,20%, penurunan BI Rate pada bulan Januari 2025 menjadi 5,75% berhasil menurunkan suku bunga pasar uang (INDONIA) hingga 5,77%. Akan tetapi, pengurangan 25 bps menjadi 5,5% pada Mei 2025 menghadapi ancaman defisit neraca berjalan yang melebar akibat dorongan impor. Penyampaian kebijakan ke sektor riil memerlukan waktu 3-6 bulan, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 direvisi menjadi 4,6-5,4%. Efektivitas kebijakan suku bunga dapat dipertanyakan dalam situasi ekonomi yang mengalami stagflasi atau hiperinflasi akibat hilangnya kepercayaan, kerusakan sistem produksi dan distribusi, serta gangguan stabilitas politik dan keamanan. Dalam kondisi krisis, instrumen kebijakan moneter yang digunakan adalah besaran moneter dengan menetapkan ceiling NDA (Net Domestic Assets), sementara suku bunga dilepas di pasar. Penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan suku bunga memiliki efek yang lebih lambat namun lebih bertahan lama terhadap output, sedangkan efek dari perubahan jumlah uang beredar lebih cepat tetapi kurang bertahan lama. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga yang adaptif dan responsif terhadap kondisi domestik dan global menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Operasi pasar terbuka (OPT) juga berfungsi sebagai alat yang efisien untuk mempertahankan likuiditas dan kestabilan nilai tukar rupiah. BI meningkatkan intervensi lewat transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk menekan volatilitas pasar keuangan yang disebabkan oleh faktor luar. Walaupun demikian, efektivitas OPT tetap dipengaruhi oleh keadaan pasar global yang tidak stabil dan ancaman krisis kesehatan baru, sehingga memerlukan sinergi kebijakan yang kuat dengan alat moneter lainnya. Operasi pasar terbuka (OPT) adalah alat kebijakan moneter yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dan likuiditas di pasar finansial. Dengan membeli dan menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka, Bank Indonesia bisa secara langsung memengaruhi basis moneter serta tingkat suku bunga di pasar uang. Saat Bank Indonesia mengakuisisi surat berharga, likuiditas di pasar bertambah karena dana berpindah ke bank komersial yang selanjutnya dapat memberikan kredit lebih luas kepada masyarakat. Sebaliknya, penjualan surat berharga menarik likuiditas sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar dan menstabilkan inflasi. Mekanisme ini memungkinkan Bank Indonesia untuk menyesuaikan jumlah uang dengan luwes dan cepat sesuai kondisi ekonomi, sehingga dapat menghindari fluktuasi berlebihan dan mempertahankan stabilitas harga serta nilai tukar rupiah.

Efektivitas operasi pasar terbuka dalam memelihara stabilitas ekonomi juga tampak dari kemampuannya untuk memengaruhi suku bunga pasar antar bank yang menjadi patokan bagi suku bunga pinjaman dan investasi di sektor riil. Melalui pengelolaan likuiditas lewat OPT, Bank Indonesia mampu menurunkan suku bunga pasar saat ekonomi memerlukan stimulus, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan

konsumsi. Sebaliknya, ketika tekanan inflasi meningkat, OPT dapat dimanfaatkan untuk memperketat likuiditas serta menaikkan suku bunga pasar, yang membantu menurunkan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Fleksibilitas dan kecepatan reaksi OPT menjadikannya alat yang efisien dibandingkan instrumen kebijakan moneter lainnya, karena dapat dengan segera disesuaikan sesuai dengan dinamika pasar dan keadaan ekonomi baik domestik maupun global. Operasi pasar terbuka (OPT) berfungsi sebagai alat vital dalam mengatur likuiditas pasar uang dan memengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek. Dengan OPT, Bank Indonesia bisa menjual atau membeli surat berharga pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Operasi pasar terbuka untuk menyerap likuiditas berlebih dilakukan, sedangkan operasi pasar terbuka untuk injeksi dilakukan guna meningkatkan likuiditas saat ada kekurangan. Keefektifan OPT terletak pada kemampuannya merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar, yang memungkinkan menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan likuiditas lewat OPT, Bank Indonesia mampu menurunkan suku bunga pasar saat ekonomi memerlukan dorongan, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi.

OPT (Operasi Pasar Terbuka) dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) terbukti berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah fluktuasi dolar AS. Intervensi valas NDF dan akuisisi SBN pada 2025 berhasil menurunkan tekanan likuiditas, dengan hasil SBN 10 tahun tetap pada 6,94%. Namun, penelitian sejarah menunjukkan bahwa OPT melalui SBI/SBPU cenderung menyebabkan distorsi di pasar uang dan kurang efisien dalam pengendalian moneter jangka panjang. Tantangan utama OPT 2025 berada pada ketidakpastian pasar finansial global dan potensi krisis kesehatan baru yang mengganggu penerapan kebijakan. Namun, meskipun OPT memiliki banyak keunggulan, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, kebijakan fiskal pemerintah, dan ekspektasi pelaku pasar. Transparansi dan prediktabilitas operasi pasar terbuka sangat penting agar pelaku pasar dapat memahami arah kebijakan moneter Bank Indonesia dan merespons dengan tepat, sehingga stabilitas pasar keuangan dapat terjaga. Selain itu, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan potensi risiko seperti keterlambatan transmisi kebijakan dan asimetri informasi yang dapat mengurangi efektivitas OPT. Oleh karena itu, keberhasilan OPT dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia sangat bergantung pada koordinasi kebijakan yang baik, komunikasi yang efektif, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

Cadangan wajib minimum (CWM) juga berperan dalam menjaga kestabilan sistem keuangan melalui pengaturan likuiditas perbankan. Akan tetapi, pengaruh GWM terhadap inflasi dan total uang yang beredar menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan GWM tidak selalu secara signifikan menurunkan inflasi, bahkan di beberapa waktu justru berkontribusi pada kenaikan inflasi akibat variasi daya beli rupiah dan inkonsistensi dalam kebijakan moneter dan fiskal. Sehingga, pengelolaan GWM harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini serta kemajuan digitalisasi di bidang keuangan. Cadangan Wajib Minimum (CWM) atau Giro Wajib Minimum (GWM) adalah salah satu alat kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Dengan menentukan persentase dana yang wajib disimpan oleh bank di Bank Indonesia, CWM mengurangi kemampuan bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Saat Bank Indonesia meningkatkan jumlah CWM, likuiditas dalam perbankan berkurang sehingga uang yang beredar di masyarakat bisa ditekan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan CWM akan memperbesar likuiditas bank yang mendorong pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan kredit dan belanja. Akan tetapi, temuan penelitian

empiris menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, kenaikan CWM justru berkaitan positif dengan inflasi, yang mungkin dipicu oleh perubahan daya beli dan nilai uang yang tidak stabil selama periode studi.

Cadangan Wajib Minimum (CWM) atau Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan alat kebijakan moneter yang berfungsi untuk mengatur jumlah uang yang beredar serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Dengan menentukan persentase dana yang wajib disimpan oleh bank di Bank Indonesia, CWM mengendalikan kapasitas bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Kebijakan CWM yang sangat ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi apabila likuiditas bank sangat terbatas, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar dapat memicu inflasi yang tinggi. Selanjutnya, Bank Indonesia harus menyesuaikan CWM dengan fleksibel serta berkoordinasi dengan instrumen moneter lain seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka untuk mempertahankan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterpaduan kebijakan ini sangat krusial untuk menanggapi perubahan dinamika ekonomi domestik dan global, agar stabilitas ekonomi Indonesia dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Bank Indonesia pun memperluas alat-alat kebijakan moneternya, termasuk penerapan Cadangan Wajib Minimum (CWM) yang lebih fleksibel, operasi pasar terbuka yang lebih proaktif, serta penerapan kebijakan makroprudensial sebagai pelengkap kebijakan moneter. Perkembangan ini mencerminkan usaha Bank Indonesia dalam memperkuat efektivitas kebijakan moneternya untuk menghadapi tantangan yang semakin rumit. Peningkatan CWM (Cadangan Wajib Minimum) dari 3% ke 5% pada tahun 1997 berhasil menstabilkan sistem perbankan pascakrisis, namun penelitian 1993–2009 menunjukkan bahwa kenaikan 1% CWM malah menyebabkan inflasi meningkat sebesar 0,34%. Fenomena paradoks ini diyakini berkaitan dengan perubahan daya beli rupiah serta inkonsistensi dalam kebijakan moneter-fiskal. Pada tahun 2025, CWM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang yang beredar karena tingginya likuiditas perbankan (Rp1.200 triliun) dan digitalisasi layanan keuangan. Namun, efektivitas CWM menghadapi rintangan dari faktor internal dan eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, kebijakan fiskal pemerintah, serta harapan pelaku pasar yang dapat memengaruhi penyampaian kebijakan moneter. Kebijakan CWM yang sangat ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jika likuiditas bank terlalu sedikit, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar bisa menyebabkan inflasi tinggi. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus menyesuaikan CWM dengan fleksibel serta berkoordinasi dengan instrumen moneter lainnya seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi kebijakan ini sangat krusial untuk menghadapi perubahan dinamika ekonomi domestik dan global yang terus berlangsung, agar stabilitas ekonomi Indonesia bisa terjaga secara berkelanjutan.

Kombinasi BI Rate 5,5%, kebijakan ekspansif, dan insentif makroprudensial (KLM) efektif menjaga likuiditas tanpa menimbulkan inflasi yang tinggi. Namun, hubungan dengan kebijakan fiskal masih kurang kuat, tercermin dari defisit APBN 2025 yang mencapai 2,8% dari PDB. Keefektifan kebijakan terpengaruh oleh ketidakpastian regulasi di sektor riil, seperti perubahan tarif pajak dan kebijakan impor yang saling tumpang tindih. BI harus meningkatkan integrasi data secara real-time dalam OPT agar kebijakan dapat lebih responsif. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap mekanisme GWM dengan mempertimbangkan digitalisasi finansial dan perilaku penimbunan bank. Koordinasi tripartit BI-OJK-Pemerintah perlu diformalkan melalui kerangka kebijakan terintegrasi untuk mengelola trade-off antara stabilitas moneter dan pertumbuhan yang inklusif. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami stagflasi atau hiperinflasi karena hilangnya kepercayaan dan gangguan stabilitas politik, keberhasilan suku bunga tinggi menjadi diragukan. Alat kebijakan moneter yang

diterapkan adalah ukuran moneter dengan menentukan batas atas NDA (Net Domestic Assets), sedangkan suku bunga dibebaskan di pasar. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga efektif dalam mengendalikan inflasi inti, tetapi tidak berpengaruh untuk menurunkan inflasi noise. Kebijakan moneter yang fleksibel dan cepat tanggap adalah kunci untuk mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global. Studi menunjukkan bahwa variasi suku bunga memberikan dampak yang lebih lambat tetapi lebih tahan lama pada output, sedangkan dampak dari perubahan jumlah uang beredar lebih cepat namun kurang bertahan lama.

Secara umum, kebijakan moneter di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kolaborasi dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural. Kerjasama yang efektif antara BI, pemerintah, dan lembaga terkait merupakan kunci dalam menghadapi tantangan seperti inflasi yang meningkat, defisit neraca berjalan, dan ketidakpastian di tingkat global. Komunikasi yang jelas dan kebijakan yang tanggap terhadap perubahan ekonomi domestik dan global akan memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara kebijakan moneter dalam menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia:

1. Mengendalikan inflasi: Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti penyesuaian suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan persyaratan cadangan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Hal ini penting agar inflasi tidak berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
2. Mengatur peredaran uang: Melalui kebijakan diskonto, Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Suku bunga yang tinggi mendorong masyarakat menabung sehingga uang beredar berkurang, sementara suku bunga rendah merangsang pinjaman dan meningkatkan peredaran uang.
3. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: Kebijakan moneter yang tepat dapat mendorong investasi dan konsumsi dengan menyesuaikan suku bunga sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi seimbang dan berkelanjutan.
4. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah: Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, menjaga daya saing ekspor dan mencegah impor berlebihan.
5. Memelihara stabilitas sistem keuangan: Bank Indonesia mengawasi dan mengatur bank serta lembaga keuangan lain untuk mencegah risiko sistemik dan krisis keuangan, termasuk melalui pengawasan perbankan dan penerapan regulasi seperti Basel II.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, yang meliputi suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum, memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ketiga instrumen ini saling berinteraksi untuk mengendalikan inflasi, mengatur likuiditas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun efektivitasnya terbukti, tantangan eksternal seperti gejolak ekonomi global dan fluktuasi aliran modal dapat mempengaruhi kemampuan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi. Sinergi antara ketiga kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

## **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi. Selain itu, peningkatan komunikasi dengan

masyarakat dan pasar sangat penting untuk mengelola ekspektasi dan meningkatkan kepercayaan. Bank Indonesia juga disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap risiko sistemik di sektor perbankan, serta melakukan stress test secara berkala. Terakhir, adaptasi terhadap perubahan kondisi global harus menjadi perhatian utama untuk memastikan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, W., & Srihadi, E. (2020). Dampak Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Harga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 65-77.
- AtjehUpdate.com. (n.d.). Instrumen Kebijakan Moneter Pengendalian Ekonomi. Retrieved from <https://atjehupdate.com/instrumen-kebijakan-moneter/>
- Azky, S., Anita, R., & Oktaviani, N. R. (2024). Peranan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 34-39.
- Bank Indonesia. (2020). Kebijakan Moneter. Diakses dari [www.bi.go.id/web/id/Publikasi/KebijakanMoneter/TinjauanKebijakanMoneter/TKM\\_0110.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/KebijakanMoneter/TinjauanKebijakanMoneter/TKM_0110.htm)
- Bank Indonesia. (2023). BI-Rate Tetap 6,00%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan. Retrieved from [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2534223.aspx/](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2534223.aspx/)
- Fauziyah, A. M. (2024). Peran kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. *Peran Kebijakan Moneter Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang*
- Firansyah, M. S., Cevia, I., Khasanah, L. N., Wibowo, I., Mariba, I. P., Salim, M., & Malik, A. (2025). Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 113-123.
- Gray, S. F., et al. (2000). *Central Banking: Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability*. MIT Press.
- Hartawan, D. (2019). Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 87-98.
- Juhro, S. M., & Iyke, B. N. (2020). Monetary Policy and Financial Conditions in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 23(2), 283-302.
- Jul Fahmi Salim. (2017). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Teuku Umar.
- Mishkin, F. S. (2001). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Addison-Wesley.
- Jul Fahmi Salim. (2017). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Teuku Umar.
- Mujiadi, I., Asyhari, A. A., & Ghondur, A. (2023). Peran Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(2), 45-60.
- Nasution, L. M., & Asnawi, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(1), 1-14.
- Nuraisyah, Siti dan Fikri Halim, "Penurunan BI Rate Belum Pengaruhi Suku Bunga KPRBTN masih mengacu pada suku bunga yang sedang berjalan", <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/591757-penurunan-bi-Ratebelum-pengaruhi-suku-bunga-kpr>
- Petriela, Yanita dkk, "BI Rate Turun Jadi 7,50% Ekspansi Kredit Berpotensi Naik", *Bisnis Indonesia*, 18 Februari 2019.
- Putra, A., & Sari, D. (2024). Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia: Analisis VECM. *Media Riset Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 210-225.

- Rahayu, S., & Wibowo, T. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 723-726.
- Salim, J. F. (2018). Pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 3(2).
- Santoso, H., & Prasetyo, B. (2025). Evaluasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis*, 8(1), 55-70.
- Setyawan, Andi Rachman. (2010). Efektifitas Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1).
- Wijayanti, I., & Susanto, S. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Stabilisasi Ekonomi Makro di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(4), 211-230.